

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan keaneka ragaman budaya dari sabang sampai Merauke. Negara yang memiliki tiga puluh empat provinsi ini mempunyai sejuta peninggalan kaya akan warisan seni dan budayanya, serta keindahan dan daya tarik dari masing-masing provinsi. Selain pulau-pulau indah, iklim tropis yang dimiliki Indonesia juga menjadikan Indonesia menjadi tujuan wisata utama. Hal ini yang membuat Indonesia berbeda dari negara yang lain sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara untuk mengunjungi keindahan yang ada di berbagai titik daerah di Indonesia untuk berwisata.

Jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia selama tahun 2019 telah mencapai 16,11 juta, kenaikan turis asing sebesar 1,88 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018 yang berjumlah 15,81 juta kunjungan wisatawan. Dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia, pemerintah melakukan perbaikan infrastruktur ke 10 provinsi destinasi prioritas di Indonesia, salah satunya D.I. Yogyakarta. Perbaikan infrastruktur yang sudah terealisasi di DIY pada tahun 2019 yakni pembangunan bandara baru yang terletak di Kabupaten Kulon Progo yaitu Bandar Udara Internasional (BPS, 2020).

Jumlah wisatawan berkunjung ke suatu daya tarik wisata dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat sekitar yang pada akhirnya dapat mempengaruhi PAD. Berikut data PAD di Kota dan Kabupaten Provinsi D.I. Yogyakarta:



Gambar 1.1. Grafik Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota dan Kabupaten Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2014-2019
 Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2020 (Data diolah)

Berdasarkan data grafik di atas menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah di Kota dan Kabupaten Provinsi D.I. Yogyakarta cenderung meningkat selama enam tahun terakhir dari tahun 2014 hingga tahun 2019, terdapat perbedaan yang sangat jauh di antara lima (5) Kota dan Kabupaten di atas, PAD paling tinggi terdapat di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan PAD rendah terdapat di Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo.

PAD Kota Yogyakarta tertinggi pada tahun 2019 mencapai total Rp. 253.163.837.254. Triliun. Realisasi 10 pajak daerah yang berkontribusi pada PAD

antara lain pajak hotel, restaurant, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, sarang burung walet, bumi bangunan (PBB), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Berbeda jauh dari tahun-tahun sebelumnya. PAD kurang dari 40 persen dari total pendapatan asli daerah, hal ini terjadi karena adanya kebocoran penarikan pajak yang menyebabkan PAD tidak mencapai target 40 persen. Pada tahun 2019 PAD melebihi target sebesar 42.9 persen, karena adanya perbaikan mekanisme penarikan pajak secara elektronik (e-tax) (Dinas Pariwisata & Bappeda DIY, 2020).

PAD Kabupaten Sleman tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp. 260.993.149.143 Triliun melampaui target dari 40 persen. Realisasi ini dari pajak daerah, retribusi daerah, dan terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jika dibandingkan tahun-tahunnya sebelumnya PAD tidak mencapai target 40 persen, karena ada beberapa pajak daerah yang belum sesuai target, antara lain pajak restaurant, reklame dan penerangan jalan, dan pajak yang sudah melebihi target yaitu pajak hotel, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) (Dinas Pariwisata & Bappeda DIY, 2020).

PAD Kabupaten Bantul dari tahun 2014 hingga 2019 cenderung fluktuasi. PAD tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp. 51.667.905.755 Triliun, kenaikan ini meningkat sebesar 9,5 persen, karena jumlah wisatawan yang berkunjung ke daya tarik wisata sebanyak 3,06 juta dengan pengunjung terbanyak di daya tarik wisata alam salah satunya Pantai Parangtritis sebanyak 2,5 juta orang, realisasi peningkatan PAD dari

pajak daerah dan retribusi daerah. Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, PAD belum mencapai target 40 persen, karena masih kurangnya jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke daya tarik wisata, hal ini terjadi karena terdapat beberapa faktor alam seperti terjadi banjir di sejumlah pantai, dan beberapa daya tarik wisata yang masih tidak mengalami perubahan sehingga membuat wisatawan bosan, serta kurangnya promosi yang dilakukan pemerintah daerah (Dinas Pariwisata, 2020).

PAD Kabupaten Kulon Progo masih terbilang kecil dibandingkan Kota dan Kabupaten lainnya selama periode 2014 hingga 2019 di Provinsi D.I Yogyakarta. PAD tertinggi pada tahun 2019 yakni sebesar Rp. 7.734.233.995 Triliun. Pertumbuhan PAD di Kulon Progo sejak tahun 2014 hingga 2019 cenderung meningkat berkisar antara 6 persen hingga 8 persen. PAD diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan (BUMD), dan lain-lain PAD yang sah berasal dari BLUD (rumah sakit dan puskesmas). Pendapatan lain-lain PAD yang sah dikembalikan ke RSUD dan puskesmas, sehingga meski masuk PAD, tetapi tidak bisa digunakan untuk pembangunan di Kulon Progo. PAD yang dapat digunakan untuk pembangunan hanya pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan (BUMD), maka dari itu pembangunan Kabupaten Kulon Progo jauh tertinggal dari Kota dan Kabupaten Lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinas Pariwisata & Bappeda DIY, 2020).

PAD Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2014 -2019 cenderung fluktuasi setiap tahunnya. PAD tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp. 32.821.570.580 Triliun

mengalami kenaikan sebesar 27.3 persen, tidak mencapai target 40 persen yang telah ditargetkan pemerintah daerah, hal ini terjadi karena adanya kebocoran retribusi dan optimalisasi pengembangan dan promosi daya tarik wisata yang belum terealisasi. Tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya PAD juga tidak mencapai target, karena kurangnya manajemen yang baik untuk pengelolaan keuangan daerah, selain itu sering terjadinya tsunami gelombang laut yang mengakibatkan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan ke pantai Gunungkidul.

Berdasarkan data yang telah dijabarkan di atas, jumlah wisatawan yang datang memberi pengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap perkembangan ekonomi pariwisata. Pengaruh tidak langsung yang dimaksud di sini yakni pada peningkatan PAD dari pajak hotel, restaurant serta pajak retribusi dan daya tarik wisata, dan pajak hiburan, sedangkan pengaruh langsung adalah dampak sektor pariwisata terhadap lingkungan sekitar, salah satunya yakni banyak ditemui pedagang kecil di sekitar tempat pariwisata. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait pengaruh sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dan permasalahan yang diteliti difokuskan pada rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pengaruh jumlah wisatawan terhadap PAD di Kota dan Kabupaten Provinsi D.I. Yogyakarta?

- 2) Bagaimanakah pengaruh pajak hotel dan restaurant terhadap PAD di Kota dan Kabupaten Provinsi D.I. Yogyakarta?
- 3) Bagaimanakah pengaruh pajak retribusi obyek dan daya tarik wisata terhadap PAD di Kota dan Kabupaten Provinsi D.I. Yogyakarta?
- 4) Bagaimanakah pengaruh pajak hiburan terhadap PAD di Kota dan Kabupaten Provinsi D.I. Yogyakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yakni:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh jumlah wisatawan terhadap PAD di Kota dan Kabupaten Provinsi D.I. Yogyakarta
- 2) Untuk menganalisis pengaruh pajak hotel dan restaurant terhadap PAD di Kota dan Kabupaten Provinsi D.I. Yogyakarta
- 3) Untuk menganalisis pengaruh pajak retribusi obyek dan daya tarik wisata terhadap PAD di Kota dan Kabupaten Provinsi D.I. Yogyakarta
- 4) Untuk menganalisis pengaruh pajak hiburan terhadap PAD di Kota dan Kabupaten Provinsi D.I. Yogyakarta

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan perkembangan ilmu pengetahuan yakni:

- 1). Manfaat Teoretis

Secara akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah ilmu pengetahuan mengenai pengaruh yang diberikan sektor pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota dan Kabupaten Provinsi D.I. Yogyakarta

2). Manfaat Praktis

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan informasi mengenai pengaruh yang diberikan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak yang didapatkan dari sektor pariwisata seperti hotel dan restoran, pajak retribusi dan daya tarik wisata, serta pajak hiburan.

3). Pembaca

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan kemampuan berfikir mengenai pengaruh yang diberikan sektor pariwisata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan pajak hotel dan restaurant, pajak retribusi dan daya tarik wisata, serta pajak hiburan.